



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

REINJA
(RENCANA KERJA)
2020

[Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupagten Bone Tahun 2020.

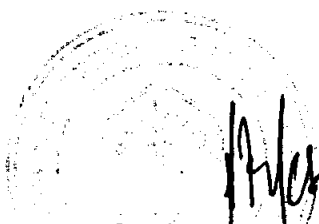
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun 2020. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Watampone,

2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KAB BONE**



Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701020 199603 1 004

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Bone
- Tabel 2.3. Review Rancangan Awal RKPD 2019
- Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	1
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Orgainsasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah	1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Orgainsasi Perangkat Daerah	8
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Orgainsasi Perangkat Daerah	9
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal	15
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	1
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona I.....	1
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Orgainsasi Perangkat Daerah 2018	6
III.3. Program dan Kegiatan	8
BAB IV. PENUTUP	38

kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupten Bone pada tahun 2020.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
37. Keputusan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub, Bagian dan Sub. Bidang pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bone.
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2020 ;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone;
2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2020.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan secara rinci pengertian Rancangan Awal Renja BKPSDM, Fungsi Rancangan Awal Renja BKPSDM dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja BKPSDM, keterkaitan Renja BKPSDM dengan Dokumen Pembangunan lainnya.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Restra SKPD

Memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu (2019)

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No.6 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007

Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BKPSDM dan hal kritis yang terkait pelayanan BKPSDM, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, dampak terhadap pencapaian visi, misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM dalam formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan

Review Terhadap Penyelenggaraan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kajian kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan para pengangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian dan pengamatan musrembang kabupaten

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja BKPSDM

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD

Bab IV. PENUTUP

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun- tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bone 2018 pada tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone dan Pencapaian Renstra 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BONE

[illegible]

1.20.1.20.08.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undang yang dilaksanakan	4 Kegiatan	-	0	-	-	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25
1.20.1.20.08.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan	4 Kegiatan	-	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	-	1 Kegiatan	25
1.20.1.20.08.05	Penyusunan SOP	Jumlah dokumen SOP yang mengikuti disusun	1 Kegiatan	-	0	-	-	-	-	-	0
1.20.1.20.08.05.23	Diklat Prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan	2000 Orang	-	0	181 Orang	181 Orang	100	0	181 Orang	0,00
1.20.1.20.08.06	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan realisasi penyusunan laporan kinerja dan keuangan serta perjanjian kinerja tepat waktu		100	24.061.800	100		100			
1.20.1.20.08.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	15 Dokumen	1 Dokumen	10.064.800	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	20
1.20.1.20.08.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	10 Dokumen	1 Dokumen	13.997.000	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	5 Dokumen	50
1.20.1.20.08.08	PROGRAM : PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum									
1.20.1.20.08.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja RKA, DPA dan DPPA yang disusun	25 Dokumen	-	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	10	40
1.20.1.20.10.08.02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website yang dikelola	1 Website	-	0	1 Website	1 Website	100	1 Website	1	100
1.20.1.20.08.23	PROGRAM: OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi			113.434.565						
1.20.1.20.08.23.04	Pengelolaan Tata Naskah Pegawai	Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola	9911	2000	113.434.565	2200	2200	100	2200	6400	64
1.20.1.20.08.28	PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat PIM II dan III			178.149.000						
1.20.1.20.08.28.06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II dan III	13 Orang	-	-	4 Orang	2 Orang	50	1 Orang	3 orang	23,07
		Jumlah PNS yang mengikuti Bintek	50 orang	5 Orang	59.250.000	-	-	-	10 Orang	15 Orang	30
1.20.1.20.08.28	Pendidikan Perencanaan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	300 Orang	150 Orang	118.899.000	-	-	-	0	150 Orang	50
1.20.1.20.08.30	PROGRAM : PEMBINA DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.726.566.400						
1.20.1.20.08.30.01	Penyusunan Pengembangan Karier PNS	Jumlah dokumen pengembangan pola karir PNS yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	99.810.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen	3 Dokumen	60
1.20.1.20.08.30.02	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah ASN yang direkrut sesuai dengan usulan formasi	2500 orang	171 Formasi	37.602.250	500 Formasi	205 formasi	41	500 Formasi	876 Formasi	35,04
1.20.1.20.08.30.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan satya lencana	1250 orang	250 Orang	39.600.000	250 orang	250 orang	100	250 orang	750	60
1.20.1.20.08.30.09	Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	51 Kasus	10 Kasus	98.400.000	15 Kasus	15 Kasus	100	15 Kasus	40 Kasus	78,43
1.20.1.20.08.30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	12 orang	-	-	1 Orang	1 Orang	100	-	1 Orang	8,33
1.20.1.20.08.30.13	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah pejabat, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklat PIM IV)	200 orang	60 Orang	1.229.500.000	40 orang	35 orang	50	40 Orang	135	67
1.20.1.20.08.30.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan monev	5 Dokumen	1 Dokumen	43.757.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
1.20.1.20.08.30.18	Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Pindahan PNS	Jumlah usul kenaikan pangkat ASN yang diproses tepat waktu	7500 Usul	1500 Usul	141.150.000	1500 Usul	1500 Usul	100	1500	4500	60
1.20.1.20.08.30.19	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai	Jumlah usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian yang diusulkan	1500 Usul	300 Usul	93.850.000	300 usul	300 usul	100	300	900	60

1.20.1.20.08.30.21	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi	750 Orang	350 Orang	92.990.000	-	-	0	150	500	66,66
1.20.1.20.08.30.22	Pelayanan Kesejahteraan Material PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan material PNS	1750 Orang	350 Orang	82.800.000	350 Orang	300 Orang	85,71	350 orang	1000 Orang	57,14
1.20.1.20.08.30.22	Pengucapan Sumpah/Janji PNS	Jumlah bantuan pendidikan ikatan Kedinasan	2000 Orang	500 Orang	33.750.000	-	-	0	500 Orang	1000 Orang	50
501.20.1.20.08.30.25	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah aplikasi data kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	207.600.000	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
1.20.1.20.08.30.31	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Pejabat administrator yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	750 Orang	34 Orang	209.300.000	-	-	0	150 Orang	184 Orang	24,53
1.20.1.20.08.30.32	Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Jumlah SK kedudukan hukum PNS yang diselesaikan	50 SK	10 SK	43.500.000	10 SK	11 SK	110	10 Kasus	31 SK	62
1.20.1.20.08.30.33	Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh SKP Baik	95%	65%	13.000.000	70%	70%	70%	70%	70%	70
1.20.1.20.08.30.34	Pengelolaan Absensi PNS	Jumlah absensi PNS yang dikelola	42 OPD	42 OPD	22.200.000	42 OPD	42 OPD	100	42 OPD	42 OPD	100
1.20.1.20.08.30.36	Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan Diklat	2 Dokumen	-	0	-	-	-	-	-	0
1.20.1.20.08.30.38	Diklat Pelayanan Prima	Jumlah Diklat Pelayanan Prima yang dilaksanakan	5 Kegiatan	-	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40
1.20.1.20.08.30.39	Pembinaan Mental dan Spritual PNS	Jumlah pembinaan mental spiritual PNS yang dilaksanakan	450 Kali	90 Kali	151.300.000	15 Kali	15 kali	100	90	195 Kali	42
1.20.1.20.08.30.40	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan harta kekayaannya	6600 wajib LHKPN	116 Wajib LHKPN	43.500.000	600 wajib LHKPN	600 wajib LHKPN	100	1500 Wajib LHKPN	2266	34,86
1.20.1.20.08.30.42	Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah rekomendasi tugas belajar dan izin belajar yang diterbitkan	740 orang	-	0	140 rekomendasi	140 rekomendasi	100	140 Rekomendasi	280 rekomendasi	37
1.20.1.20.08.30.44	Penataan SDM Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi	Jumlah PNS yang mengikuti assesment	256 orang	-	0	-	-	-	38	38	14,84
1.20.1.20.08.30.45	Diklat Peningkatan Kompetensi Lurah	Jumlah Lurah yang mengikuti Diklat Kompetensi	42 orang	-	0	-	-	-	0	0	0
1.20.1.20.08.30.46	Diklat Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Satpol yang mengikuti diklat	40 orang	-	0	-	-	-	0	0	0
1.20.1.20.08.30.47	Diklat Pemadam Kebakaran	Jumlah diklat yang diadakan	1 kegiatan	-	0	-	-	-	0	0	0
1.20.1.20.08.30.48	Workshop Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Aparatur	Jumlah workshop yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-	0	-	-	-	0	0	0
1.20.1.20.08.30.49	Bintek Peningkatan Kompetensi Camat	Jumlah bintek yang dilaksanakan	1 kegiatan	-	0	-	-	-	0	0	0

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Kedudukan sebagai unsur lembaga teknis daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Kepala Badan

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang mempunyai kewenangan daerah.
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur ;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone berupaya untuk meningkatkan kualitas aparturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, dan sosialisasi. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita- citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Isu-isu strategis pembangunan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone adalah :

1. Masih rendahnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjangkan (Diklat PIM);
2. Kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan tugas belajar dan mengajukan ijin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan;
3. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.
4. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja;
5. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena pada unit kerja belum dilaksanakan analisis jabatan.
6. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, dan integrated;

7. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
8. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
9. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa dilaksanakan secara optimal;
10. Sistem penilaian kinerja belum obyektif;
11. Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural (DIKLAT PIM)
2. Mengoptimalkan pemberian tugas bejalat dan izin belajar
3. Melaksanakan pengisian jabatan sesuai kompetensi
4. Melaksanakan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan
5. Melaksanakan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi
6. Meningkatkan disiplin PNS
7. Meningkatkan sistem dan mekanisme pola pengembangan pola karier pegawai.

Sasaran yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone antara lain adalah :

1. Meningkatnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM.
2. Tertatanya pengisian jabatan sesuai dengan kompetensi.
3. Meningkatnya jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar
4. Meningkatnya Disiplin PNS

5. Terlaksananya penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi
6. Terwujudnya standar kompetensi jabatan dan pedoman pola karir jabatan
7. Meningkatnya sistem dan mekanisme pola pengembangan pola karier pegawai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-2023 dan direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-2023, mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2018-2023. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lainya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-2023 yang menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-2023, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-	
					2019	2020
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Meningkatnya kualitas data dan pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Akurasi up-date data base kepegawaian (%)	70	75	80
			Persentase kenaikan pangkat ASN tepat waktu sesuai SOP	70	75	80
			Persentase pengisian jabatan structural	80	83	86
2.	Meningkatkan Aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional	Meningkatnya kualitas PNS	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kediklatan	73	75	80
			Persentase pegawai memperoleh nilai SKP Baik	70	75	80
			Persentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	70	60	50
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian	Predikat evaluasi sakip oleh APIP	B	B	B

Strategi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Bone untuk mendukung pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan up date (pemutakhiran) data kepegawaian secara periodik,
2. Melakukan kerjasama dengan BKN dan Telkom.
3. Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.
4. Mengoptimisasi pemeliharaan peralatan kerja secara berkala
5. Melakukan Perawatan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional secara berkala.
6. Melakukan Sosialisasi SOP administrasi kepegawaian kepada setiap SKPD
7. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian Kinerja PNS.
8. Melakukan inventarisasi kebutuhan Pegawai pada masing-masing SKPD
9. Memberikan peluang bagi pegawai yang ingin melanjutkan studi secara terbuka sesuai ketentuan berlaku.
10. Melakukan analisis kebutuhan diklat pada masing-masing SKPD
11. Mengoptimalkan penyelenggaraan Diklat, kursus dan bintek
12. Mengusulkan calon peserta diklat Pim II, III dan IV kepada Badiklat Provinsi
13. Mengoptimalkan pembinaan pegawai
14. Menyusun kriteria dan menerapkan reward and punishment secara transparan
15. Penyusunan dan penerapan sistem dan mekanisme pengembangan karier
16. Mengoptimalkan standar kompetensi jabatan
17. Melaksanakan penjadwalan ceramah keagamaan disetiap SKPD.

Melihat kondisi dan potensi yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone, serta faktor-faktor kunci keberhasilan ditambah tersedianya data yang akurat dan relevan, untuk 5 tahun mendatang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone telah menetapkan kebijakan dalam pembangunan bidang kepegawaian atau aparatur pemerintah daerah.

Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Bone yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan yang disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemutakhiran data dan perawatan software secara periodik.
2. Melakukan kerjasama dengan BKN dan Telkom dalam penyediaan data kepegawaian
3. Menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pemeliharaan peralatan kerja dan gedung secara berkala.
5. Menyusun SOP pada masing-masing bidang.
6. Melakukan sosialisasi SOP administrasi kepegawaian
7. Melaksanakan analisis kinerja PNS secara optimal.
8. Melakukan rekrutmen pegawai secara selektif sesuai dengan kebutuhan SKPD.
9. Mengoptimalkan peluang bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan melalui izin belajar dan tugas belajar.
10. Menyelenggarakan analisis kebutuhan diklat teknis bagi masing-masing SKPD.

11. Menyelenggarakan diklat teknis, kursus dan bintek sesuai dengan kebutuhan organisasi.
12. Mengusulkan dan menyediakan alokasi anggaran untuk diklat PIM II dan III.
13. Mengoptimalkan pembinaan pegawai dan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan.
14. Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
15. Melaksanakan dan menerapkan sistem dan mekanisme pola pengembangan karier PNS.
16. Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual secara berkesinambungan

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi kebutuhan;
2. Kedisiplinan pegawai yang masih rendah;
3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang belum optimal;
4. Belum Akuratnya Data Kepegawaian; dan
5. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.

Maka selanjutnya dalam proses kedepan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bone dan Manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bone perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam menciptakan pemerintahan yang handal dan terpercaya.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

TABEL II.3.

Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. T. Riattang Barat	Terlaksananya terbit administrasi per surat	3075 surat	46.080.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. T. Riattang Barat	Terlaksananya terbit administrasi per surat 12 bulan	3075 surat	46.080.200	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi sesuai rencana kebutuhan	1 Tahun	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi sesuai rencana kebutuhan selama 12 bulan	1 Tahun	8.292.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.354.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Tahun	3.354.000	
4	Penediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	45.402.000	Penediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	45.402.000	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki sesuai rencana kebutuhan	36 Unit	11.600.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja yang diperbaiki	36 Unit	6.700.000	
6	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan sesuai kebutuhan	1 Tahun	5.120.000	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan sesuai kebutuhan	1 Tahun	5.120.000	
7	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah jenis terbitan surat kabat dan majalah	6 Media surat kabar	12.000.000	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah jenis terbitan surat kabat dan majalah	6 Media surat kabar	9.000.000	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	171.900.00	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	225.604.900	
9	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan ATK Barang cetakan dan pengadaan serta makanan dan minuman	1 Tahun	259.932.525	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat ketersediaan ATK Barang cetakan dan pengadaan serta makanan dan minuman	1 Tahun	274.932.525	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	545.454.100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	545.454.100	
1.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	AC 1 unit, Lemari Costum 1 Buah	40.000.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	AC 1 unit, Lemari Costum 1 Buah	36.500.000	
2.	Pengadaan Peralatan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mesin Photo Copy 1 unit, Mesin Absensi 4 Unit, Komputer All in One 2 Unit, Notebook 5 Unit, Print Inkjet 2 Unit, CCTV 3 Unit, Proyektor 1 Unit	161.840.000	Pengadaan Peralatan Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mesin Photo Copy 1 unit, Mesin Absensi 4 Unit, Komputer All in One 2 Unit, Notebook 5 Unit, Print Inkjet 2 Unit, CCTV 3 Unit, Proyektor 1 Unit	170.570.000	
3	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah pengadaan mebeleur	1 Set kursi Sofa	10.000.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah pengadaan mebeleur	1 Set kursi Sofa	10.000.000	

4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T. Riattang Barat	Tingkat pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	1 Tahun	10.300.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah pengadaan mebeleur	1 Set kursi Sofa	10.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Mobil 3 unit, Motor 10 Unit	101.250.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Mobil 3 unit, Motor 10 Unit	90.500.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin PNS	100%	374.838.700	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin PNS	100%	505.958.200	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	67 Pasang	20.100.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	67 Pasang	20.100.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	597.684.600	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	575.916.600	
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan : 1. PP. No. 11 Tahun 2017 2. PP. No. 46 Tahun 2011 3. PP. No. 53 Tahun 2013 4. BinteK Aplikasi e.LKHPN 5. BinteK Aplikasi e.Kinerja PNS 6. Salisiasi Peraturan Bupati tentang TPP bagi PNS dan CPNSD	80 Orang 80 Orang 80 Orang 570 Orang 200 Orang 180 Orang	1.030.64.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan : 1. PP. No. 11 Tahun 2017 2. PP. No. 46 Tahun 2011 3. PP. No. 53 Tahun 2013 4. BinteK Aplikasi e.LKHPN 5. BinteK Aplikasi e.Kinerja PNS 6. Salisiasi Peraturan Bupati tentang TPP bagi PNS dan CPNSD	80 Orang 80 Orang 80 Orang 570 Orang 200 Orang 180 Orang	1.014.568.800	
2.	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNSD	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah CPNSD Yang mengikuti Diklat Prajabatan	181 Orang	441.627.000	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNSD	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah CPNSD Yang mengikuti Diklat Prajabatan	181 Orang	441.627.000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja dan Keuangan	100%	131.560.600	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja dan Keuangan	100%	-	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	4.797.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	4.797.000	
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	2 Dokumen	3.624.125	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	2 Dokumen	3.624.125	
3.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Renja dan Renstra yang disusun	3 Dokumen	2.840.000	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Renja dan Renstra yang disusun	3 Dokumen	6.702.000	
VI	Program Pengembangan Data/Informasi		Cakupan Pengembangan Data/Informasi	100%				Cakupan Pengembangan Data/Informasi	100%		
1.	Pengelolaan Tata Naskah Pegawai	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pemutakhiran data ASN dan pemeliharaan arsip Kepegawaian	2200 Dokumen	95.500.000	Pengelolaan Tata Naskah Pegawai	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pemutakhiran data ASN dan pemeliharaan arsip Kepegawaian	2200 Dokumen	95.500.000	
VII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Cakupan Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	100%				Cakupan Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	100%		
1.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Media Massa	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Website yang dikelola	1 Website	20.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Media Massa	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Website yang dikelola	1 Website	20.000.000	
VI	Program Pendidikan Kedinasan		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat PIM II dan III	100%		Program Pendidikan Kedinasan		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat PIM II dan III	100%		
1	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Luar Daerah	Jumlah ASN mengikuti LATPIM III, Kursus singkat dan Pelatihan	4 Orang	45.625.0000	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Luar Daerah	Jumlah ASN mengikuti LATPIM III, Kursus singkat dan Pelatihan	3 Orang	31.625.000	
VIII	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pengembangan Pola Karir PNS yang tersusun	1 Dokumen	50.100.000	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pengembangan Pola Karir PNS yang tersusun	1 Dokumen	50.100.000	

2.	Seleksi Penerimaan CPNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang direkrut sesuai dengan usulan formasi	Orang	406.911.000	Seleksi Penerimaan CPNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang direkrut sesuai dengan usulan formasi	Orang	406.911.000	
3.	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan Satya Lencana	250 Orang	27.850.000	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan Satya Lencana	250 Orang	22.850.000	
4.	Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	10 Kasus	56.600.000	Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	10 Kasus	66.600.000	
5.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	1 Orang	50.000.000	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	1 Orang	50.000.000	
6.	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	35 Orang	708.050.000	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural	35 Orang	708.050.000	
7.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan movev	1 Dokumen	22.247.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan movev	1 Dokumen	42.247.000	
8.	Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Perpindahan PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Usul Kenaikan pangkat ASN yang diproses	1500 Usul	106.900.000	Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Perpindahan PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Usul Kenaikan pangkat ASN yang diproses	1500 Usul	106.900.000	
9.	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah usul pensiun dan Kenaikan pangkat pengabdian yang diusulkan	300 Orang	73.100.000	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah usul pensiun dan Kenaikan pangkat pengabdian yang diusulkan	300 Orang	73.105.850	
10.	Pelayanan Kesejahteraan Material PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang mendapatkan Pelayanan Material PNS	350Orang	112.550.000	Pelayanan Kesejahteraan Material PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah PNS yang mendapatkan Pelayanan Material PNS	350Orang	11.550.000	
11.	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Aplikasi Data Kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	152.061.250	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Aplikasi Data Kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	153.861.300	
12.	Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah SK kedudukan hukum PNS yang diselesaikan	10SK	48.600.000	Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah SK kedudukan hukum PNS yang diselesaikan	10SK	48.600.000	
13.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Kec. T. Riattang Barat	Persentase PNS yang bernilai SKP Baik	100%	175.850.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Kec. T. Riattang Barat	Persentase PNS yang bernilai SKP Baik	100%	205.850.000	
14.	Pengelolaan Sistem Absensi PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Absensi PNS yang Dikelola	Semua OPD	15.000.000	Pengelolaan Sistem Absensi PNS	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Absensi PNS yang Dikelola	Semua OPD	15.000.000	
15.	Diklat Pelayanan Prima	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	83.938.000	Diklat Pelayanan Prima	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	83.938.000	
16.	Bimbingan Mental dan Spritual PNS	Kec. T. Riattang Barat	JumlahBintal yang dilaksanakan	15 Kali	61.650.000	Bimbingan Mental dan Spritual PNS	Kec. T. Riattang Barat	JumlahBintal yang dilaksanakan	15 Kali	69.150.000	
17.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan harta kekayaannya	600 Orang	26.808.100	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan harta kekayaannya	600 Orang	26.808.100	
18.	Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah rekomendasi tugas belajar dan izin belajar yang diterbitkan	140 rekomendasi	67.735.000	Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Kec. T. Riattang Barat	Jumlah rekomendasi tugas belajar dan izin belajar yang diterbitkan	140 rekomendasi	67.735.000	

II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

III.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone tahun 2018 sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.20.1.20.08.01	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	865.093.500			100%	867.745.000
1.20.1.20.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening biaya tagihan telepon, listrik dan air yang dibayarkan	Kec. T.Riattang Barat	12 paket	20.000.000	DAU	-	12 paket	22.000.000
1.20.1.20.08.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. T.Riattang Barat	12 Paket	10.000.000	DAU	-	12 paket	11.000.000
1.20.1.20.08.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi dan jasa teknis mendukung pelayanan administrasi keuangan	Kec. T.Riattang Barat	108 Kali	45.000.000	DAU	-	108 kali	45.000.000
1.20.1.20.08.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kec. T.Riattang Barat	4 paket	23.900.000	DAU	-	4 paket	23.000.000
1.20.1.20.08.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor sesuai kebutuhan penganggaran	Kec. T.Riattang Barat	12 Paket	6.745.000	DAU	-	12 paket	6.745.000
1.20.1.20.08.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan	Kec. T.Riattang Barat	120 Kali	16.000.000	DAU	-	120 kali	17.000.000
1.20.1.20.08.01.023	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi kementerian nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten yang diikuti	Kec. T.Riattang Barat	150 kegiatan	400.000.000	DAU	-	150 kegiatan	400.000.000
1.20.1.20.08.01.024	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. T.Riattang Barat	72 paket	343.448.500	DAU	-	100%	343.448.500
1.20.1.20.08.02	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ARAK	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik		100%	706.472.000			100%	780.000.000
1.20.1.20.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kec. T.Riattang Barat	6 Paket	76.750.000	DAU	-	6 Paket	80.000.000
1.20.1.20.08.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. T.Riattang Barat	12 Paket	272.072.000	DAU	-	12 paket	300.000.000
1.20.1.20.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Kec. T.Riattang Barat	4 Paket	90.000.000	DAU	-	3 paket	100.000.000
1.20.1.20.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor yang dipelihara	Kec. T.Riattang Barat	4 Peket	120.000.000	DAU	-	4 paket	150.000.000

1.20.1.20.08.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kec. T.Riattang Barat	13 paket	147.650.000	DAU	-	13 paket	150.000.000
1.20.1.20.08.03	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		100%	21.000.000	DAU	-	-	-
1.20.1.20.08.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kec. T.Riattang Barat	60 pasang	21.000.000	DAU	-	-	-
1.20.1.20.08.05	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	750.000.000	DAU	-	100%	210.000.000
1.20.1.20.08.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kec. T.Riattang Barat	1 Kegiatan	150.000.000	DAU	-	1 Kegiatan	150.000.000
1.20.1.20.08.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan		1 Kegiatan	150.000.000	DAU	-	1 Kegiatan	15.000.000
1.20.1.20.08.05.23.	Diklat Prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan	Kec. T.Riattang Barat	300 Orang	1.450.000.000	DAU	-	300 orang	1.450.000.000
1.20.1.20.08.05	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	Kec. T.Riattang Barat	-	-		-	1 Dokumen	45.000.000
1.20.1.20.08.06	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan realisasi penyusunan laporan kinerja dan keuangan serta perjanjian kinerja tepat waktu		100%	9.624.000		-	100%	10.624.000
1.20.1.20.08.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. T.Riattang Barat	3 Dokumen	6.000.000	DAU	-	3 Dokumen	7.000.000
1.20.1.20.08.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Kec. T.Riattang Barat	2 Dokumen	3.624.000	DAU	-	2 Dokumen	3.624.000
1.20.1.20.08.08	PROGRAM : PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum		100%	61.685.000	DAU	-	100%	64.000.000
1.20.1.20.08.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja RKA, DPA dan DPPA yang disusun	Kec. T.Riattang Barat	5 Dokumen	23.685.000		-	5 Dokumen	24.685.000
1.20.1.20.10.08.02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan Website yang dikelola	Kec. T.Riattang Barat	1 Website	38.000.000	DAU	-	1 Website	40.000.000
1.20.1.20.08.23	PROGRAM: OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi		100%	100.000.000		-	100%	105.000.000
1.20.1.20.08.23.04.	Pengelolaan Tata Naskah Pegawai	Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola	Kec. T.Riattang Barat	2300 Arsip	100.500.000	DAU	-	2500 arsip	105.000.000
1.20.1.20.08.28	PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi syarat kediklatan		100%	285.000.000		-	100%	190.000.000
1.20.1.20.08.28.06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM Tk. III	Kec. T.Riattang Barat	2 Orang	90.000.000	DAU	-	2 Orang	90.000.000
		Jumlah PNS yang mengikuti BinteK	Kec. T.Riattang Barat	10 Orang	100.000.000	DAU	-	10 orang	100.000.000
1.20.1.20.80.28.	Pendidikan Perencanaan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Kec. T.Riattang Barat	150 orang	95.000.000	DAU	-	0	0

1.20.1.20.08.30	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100%	3.335.882.000		-	100%	3.428.698.000
1.20.1.20.08.30.01	Penyusunan Pengembangan Karier PNS	Jumlah dokumen pengembangan pola karir PNS yang disusun	Kec. T.Riattang Barat	1 Dokumen	50.000.000	DAU	-	1 Dokumen	55.000.000
1.20.1.20.08.30.02	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah ASN yang direkrut sesuai dengan usulan formasi	Kec. T.Riattang Barat	500 Formasi	415.000.000	DAU	-	500 Formasi	420.000.000
1.20.1.20.08.30.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan sanya lencana	Kec. T.Riattang Barat	250 Orang	30.850.000	DAU	-	250 orang	35.850.000
1.20.1.20.08.30.09	Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	Kec. T.Riattang Barat	12 kasus	60.000.000	DAU	-	10 Kasus	65.000.000
1.20.1.20.08.30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kec. T.Riattang Barat	3 Orang	150.000.000	DAU	-	3 orang	150.000.000
1.20.1.20.08.30.13	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah pejabat, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklat PIM IV)	Kec. T.Riattang Barat	40 Orang	894.328.000	DAU	-	40 orang	983.760.000
1.20.1.20.08.30.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan monev	Kec. T.Riattang Barat	1 Dokumen	84.000.000	DAU	-	1 dokumen	84.500.000
1.20.1.20.08.30.18	Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Perpindahan PNS	Jumlah usul kenaikan pangkat ASN yang diproses tepat waktu	Kec. T.Riattang Barat	1500 Usul	80.000.000	DAU	-	1500 usul	85.000.000
1.20.1.20.08.30.19	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai	Jumlah usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian yang diusulkan	Kec. T.Riattang Barat	300 usul	75.000.000	DAU	-	300 usul	80.000.000
1.20.1.20.08.30.21	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi	Kec. T.Riattang Barat	86 Orang	50.000.000	DAU	-	89 orang	55.000.000
1.20.1.20.08.30.22	Pelayanan Kesejahteraan Material PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan material PNS	Kec. T.Riattang Barat	350 Orang	20.000.000	DAU	-	350 orang	25.000.000
1.20.1.20.08.30.22	Pengucapan Sumpah//Janji PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS	Kec. T.Riattang Barat	500 Orang	19.000.000	DAU	-	500 orang	20.000.000
1.20.1.20.08.30.25	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah aplikasi data kepegawaian yang dikelola	Kec. T.Riattang Barat	1 Aplikasi	145.000.000	DAU	-	1 Aplikasi	150.000.000
1.20.1.20.08.30.31	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Pejabat administrator yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi	Kec. T.Riattang Barat	150 Orang	300.000.000	DAU	-	150 orang	350.000.000
1.20.1.20.08.30.32	Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Jumlah SK kedudukan hukum PNS yang diselesaikan	Kec. T.Riattang Barat	10 SK	50.000.000	DAU	-	10 SK	55.000.000
1.20.1.20.08.30.33	Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh SKP Baik	Kec. T.Riattang Barat	75%	90.000.000	DAU	-	80%	95.000.000
1.20.1.20.08.30.34	Pengelolaan Absensi PNS	Jumlah absensi PNS yang dikelola	Kec. T.Riattang Barat	Semua OPD	20.000.000	DAU	-	Semua OPD	25.000.000
1.20.1.20.08.30.36	Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan Diklat	Kec. T.Riattang Barat	1 Kegiatan	73.766.000	DAU	-	-	0
1.20.1.20.08.30.38	Diklat Pelayanan Prima	Jumlah Diklat Pelayanan Prima yang dilaksanakan	Kec. T.Riattang Barat	1 Kegiatan	83.938.000	DAU	-	1 Kegiatan	83.938.000

1.20.1.20.08.30.39	Pembinaan Mental dan Spritual PNS	Jumlah pembinan mental spritual PNS yang dilaksanakan	Kec. T.Riattang Barat	90 Kali	95.000.000	DAU	-	90 Kali	100.650.000
1.20.1.20.08.30.40	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan harta kekayaannya	Kec. T.Riattang Barat	1500 Orang	30.000.000	DAU	-	1500 orang	40.000.000
1.20.1.20.08.30.42	Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah rekomendasi tugas beajar dan izin belajar yang diterbitkan	Kec. T.Riattang Barat	150 Orang	145.000.000	DAU	-	150 Orang	150.000.000
1.20.1.20.08.30.44	Penataan SDM Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi	Jumlah PNS yang mengikuti assesment	Kec. T.Riattang Barat	38 Orang	210.000.000	DAU	-	50 Orang	215.000.000
1.20.1.20.08.30.	Penyelenggaraan Persembayangan bagi PNS yang Meninggal	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan persemayangan	Kec. T.Riattang Barat	10 orang	15.000.000	DAU	-	10 orang	20.000.000
1.20.1.20.08.30.	Pengelolaan Adminstrasi Izin Perkawinan dan Izin Perceraian	Jumlah izin perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	Kec. T.Riattang Barat	10 izin	80.000.000	DAU	-	17 izin	85.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun 2020 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.